



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 226 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SUDETAN KALI CILIWUNG MENUJU
KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN BIDARA CINA, KELURAHAN CIPINANG
CEMPEDAK, KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KECAMATAN JATINEGARA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2789 Tahun 2015, telah ditetapkan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat diselesaikan secara keseluruhan proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu berlaku Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung dimaksud, perlu pembaharuan penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SUDETAN KALI CILIWUNG MENUJU KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN BIDARA CINA, KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK, KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas tempat kerja ± 7.170 m² (lebih kurang tujuh ribu seratus tujuh puluh meter persegi) sesuai peta situasi skala 1 : 2.000 dengan Nomor Peta 19/T/PPSR/DCKTRP/II/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka pembangunan Sudetan Kali Ciliwung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.

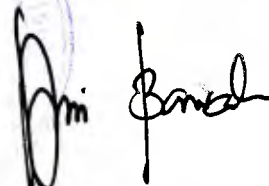
KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.

- KELIMA** : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2019

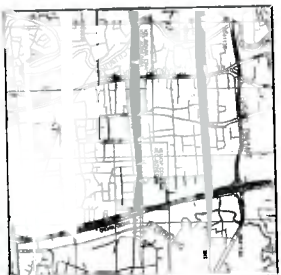
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

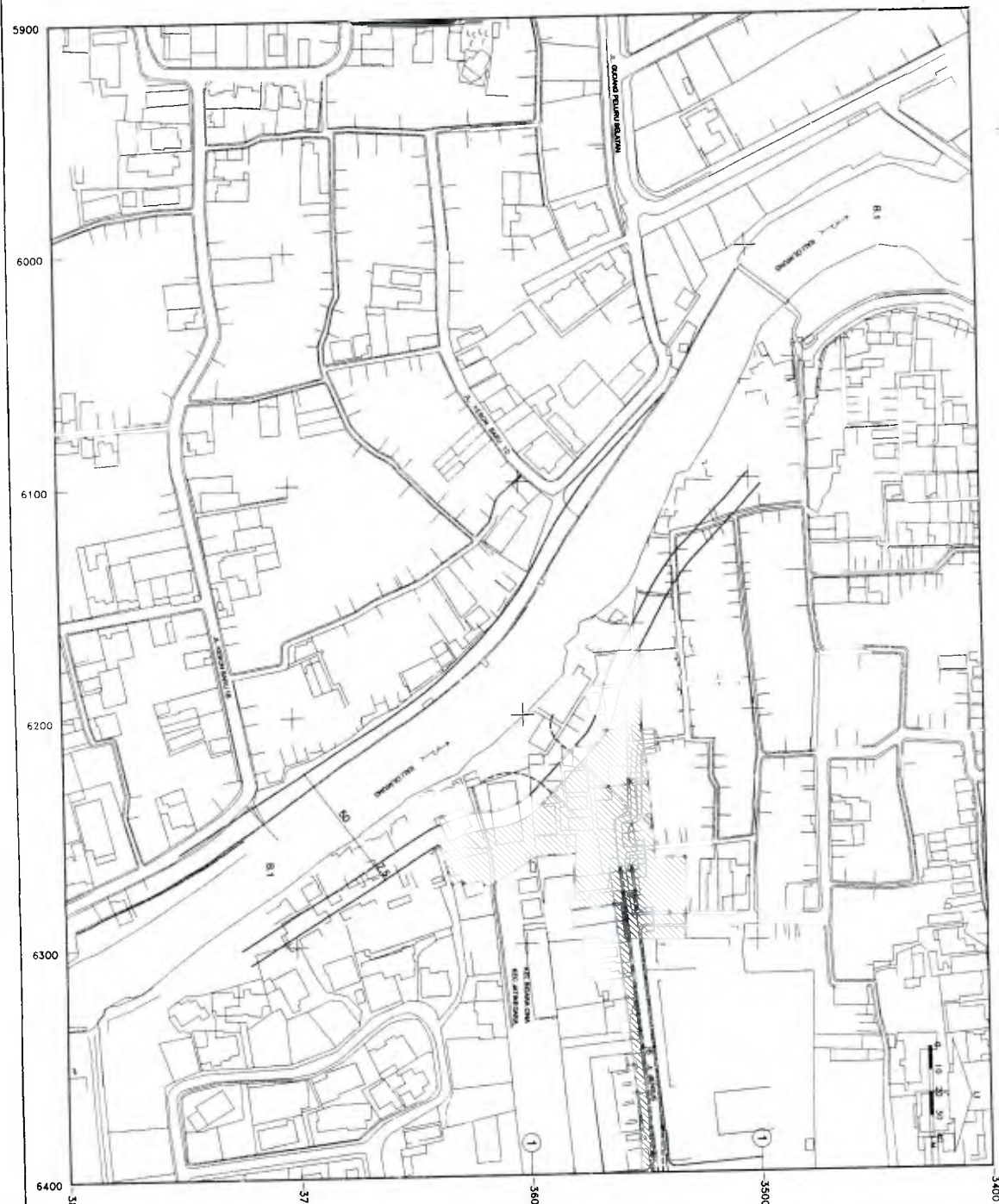
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Timur
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
18. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Jatinegara
20. Lurah Bidara Cina
21. Lurah Cipinang Cempedak
22. Lurah Cipinang Besar Selatan



SEMATA
D
TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN.
1. BERBASISAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA STRUKTUR RUANG DAN PERENCANAAN ZONASI
 2. BERBASISAN SURvei DAN PEMERIKSAAN TANAH DAN BANGUNAN DENGAN PERMITSURVEI DAN PEMERIKSAAN TANAH DAN BANGUNAN
 3. BERBASISAN SURvei DAN PEMERIKSAAN TANAH DAN BANGUNAN DENGAN PERMITSURVEI DAN PEMERIKSAAN TANAH DAN BANGUNAN
 4. TERBUKAP PERSEKUTUHAN TANAH YANG TERKAWA RENCANA TANAH ADAR TUNNEL DAN RENCANA STRUKTUR RUANG
 5. SEBELUM MELAKUKAKAN PEMBANGUNAN HARUS BERHIMPUNAN DENGAN PERMITSURVEI DAN PEMERIKSAAN TANAH DAN BANGUNAN

- RENCANA TUNNEL
- RENCANA KOTA

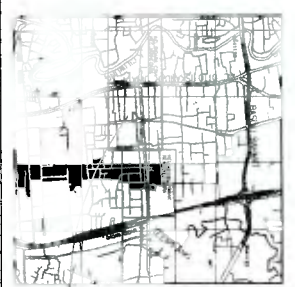
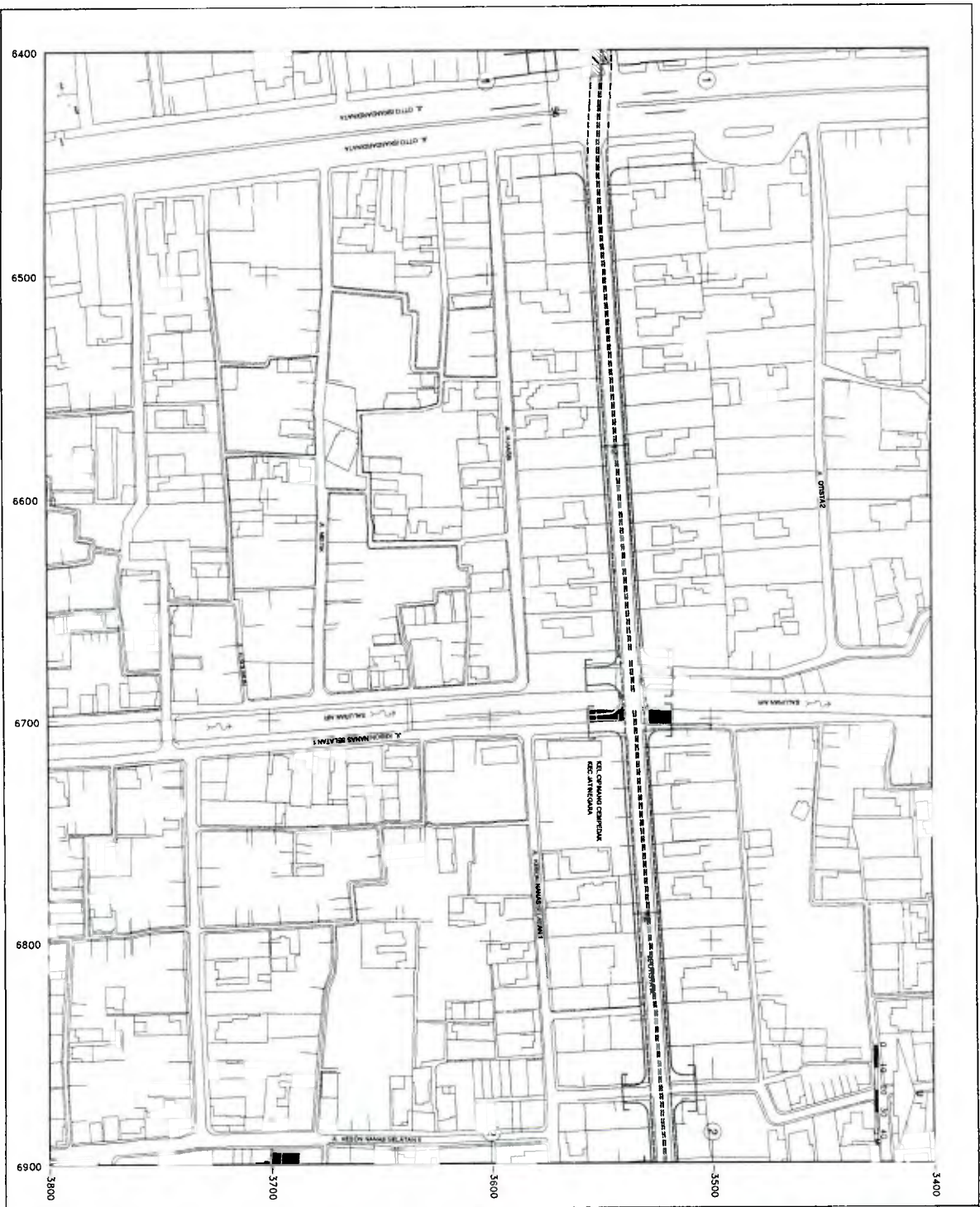


SUBERINUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

M. S. Bismillah
MIES BISMILLAH

DIREKTUR DINAS CPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN IBUKOTA JAKARTA	DIREKTUR DINAS CPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	NO. SK/2019/13	13	14	1 : 2.000
--	---	----------------	----	----	-----------

19/T/PPR/DAK/II/2019
PENERBIT
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan



SEMATA MATYA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

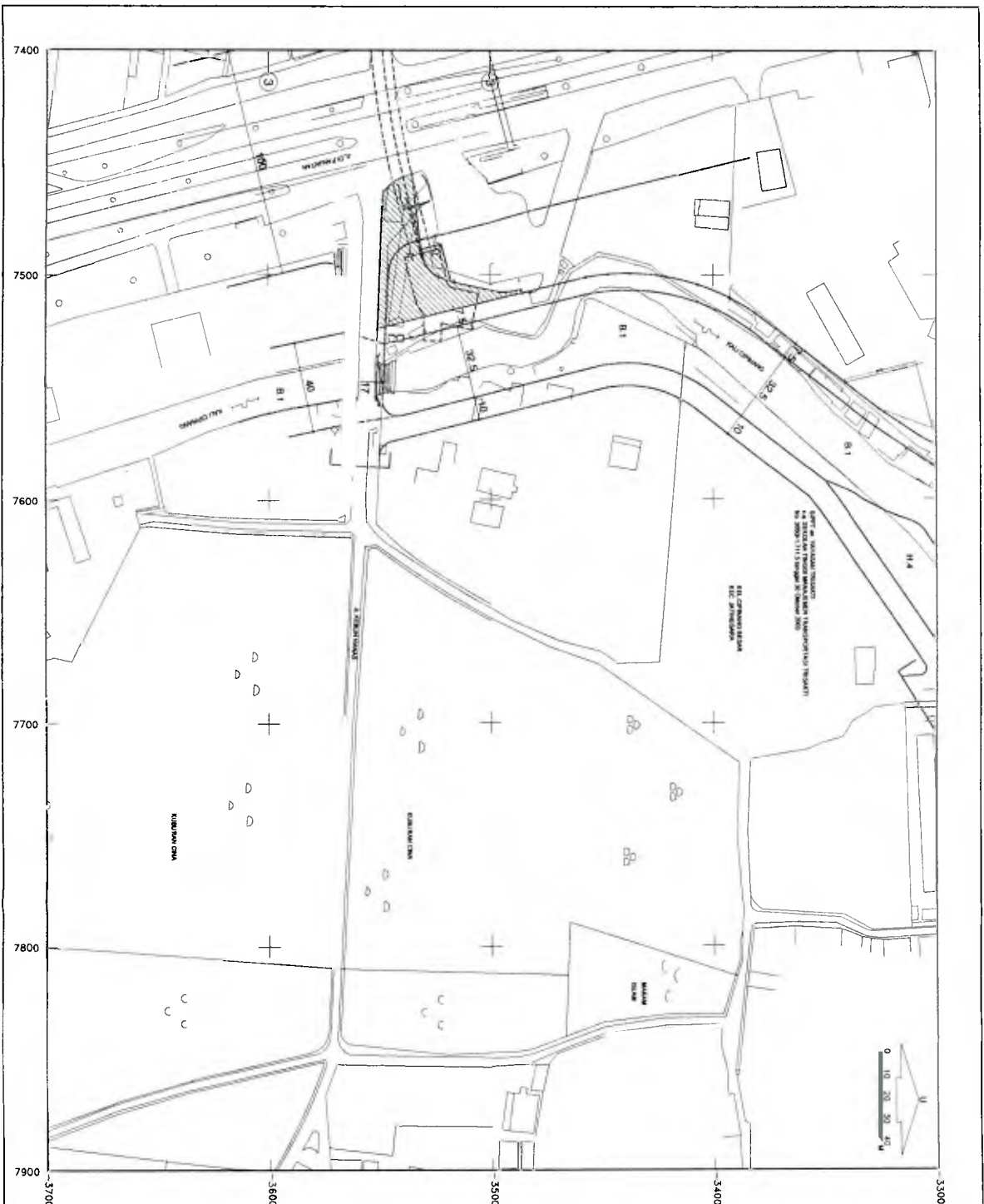
LOKASI PROJEK

PETA KOTASAR 1 : 40.000

- KEPERLUAN:
1. RENCANA BUKU PETA NO. 1 TAHUN 2014 TERANG BENCANA DETIL TATA RUANG DAN PERALIHAN ZONASI
 2. RENCANA BUKU PETA DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN UUDU DAN PERUMAHAN BAWAT ORKORATI FEDERAL SAMBUT DWA AN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIMUNG OSADANE NOMOR : PM/03/2018/2018 YAKZOL 28 JANUARI 2019 PERMUL PERCHONKAN
 3. PERATURAN LOKASI PEMBANGUNAN SUDETA KALI CILIMUNG KE KUALI BAKUARI TANAR
 4. PERMUL DITERIMA TRACE SUDETA KALI CILIMUNG MERUJU KUALI BAKUARI TANAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 5. RENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PERUMAHAN BAWAT ORKORATI FEDERAL SAMBUT DWA AN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIMUNG OSADANE NOMOR : PM/03/2018/2018 YAKZOL 28 JANUARI 2019 PERMUL PERCHONKAN
 6. SEBELUM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KOTI BERKONDISI DENGAN KERTAS TERKAT

- RENCANA TUNNEL
- RENCANA KOTA

SUBERNUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		LAMPIRAN KERTASUAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA	
A. S. BASMIEDAN		NOMOR	226 Tahun 2019
		TANGGAL	13
		BULAN	Februari
		TAHUN	2019
DIBETUKU : 3/		PERCHON	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIMUNG OSADANE
DIBETUKU : 9		LEMBANGKE	24
DIBETUKU : 04		SKALA	1 : 200
DIBETUKU : K t			
DIBETUKU : 19/T/PRK/DEKAT/II/2019			
PERMUL TRACE SUDETA KALI CILIMUNG MERUJU KUALI BAKUARI TANAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN			



PELA KHITSAH 1 : 40 000



LOKASI PROJEK

SEHATA MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

- KETERANGAN:
- 1 BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERENCANAAN ZONASI
 - 2 BERDASARKAN SURAT DARI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BUKA BERSAMA SAMA SUDAN SULUNG GELANGGANG NOMOR PM/02/2013 TANGGAL 28 JANUARI 2013 PERUMAHAN
 - 3 BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERENCANAAN ZONASI
 - 4 TERDAPAT PERSE, TANAH YANG TERSEMA RENCANA TUNEL, AGAR LUKA-NYA DIBERSIHKAN
 - 5 SEBELUM MEMASUKKAN PEMBANGUNAN KAH BERKONDISI DENGAN INSTANSI TERKAIT

- RENCANA TUNEL
- RENCANA KOTA

SUBERNUER PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA

[Signature]
ES BASWEDAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 226 TAHUN 2019

TANGGAL 13

BULAN Februari

TAHUN 2019

REVISI 01

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PERTANAHAN DAN PEMBANGUNAN STRUKTUR RUMAH KAWA, SE TATA AIR DAN UTILITAS	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PERTANAHAN DAN PEMBANGUNAN STRUKTUR RUMAH KAWA, SE TATA AIR DAN UTILITAS	LEMBAR NO. 4/4
			SKALA 1 : 2000

19/5/PPSR/DCETPR/I/2019

TRACÉ SUDETAN KALI CILIWING MENUJU KANAL BANJIR TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN